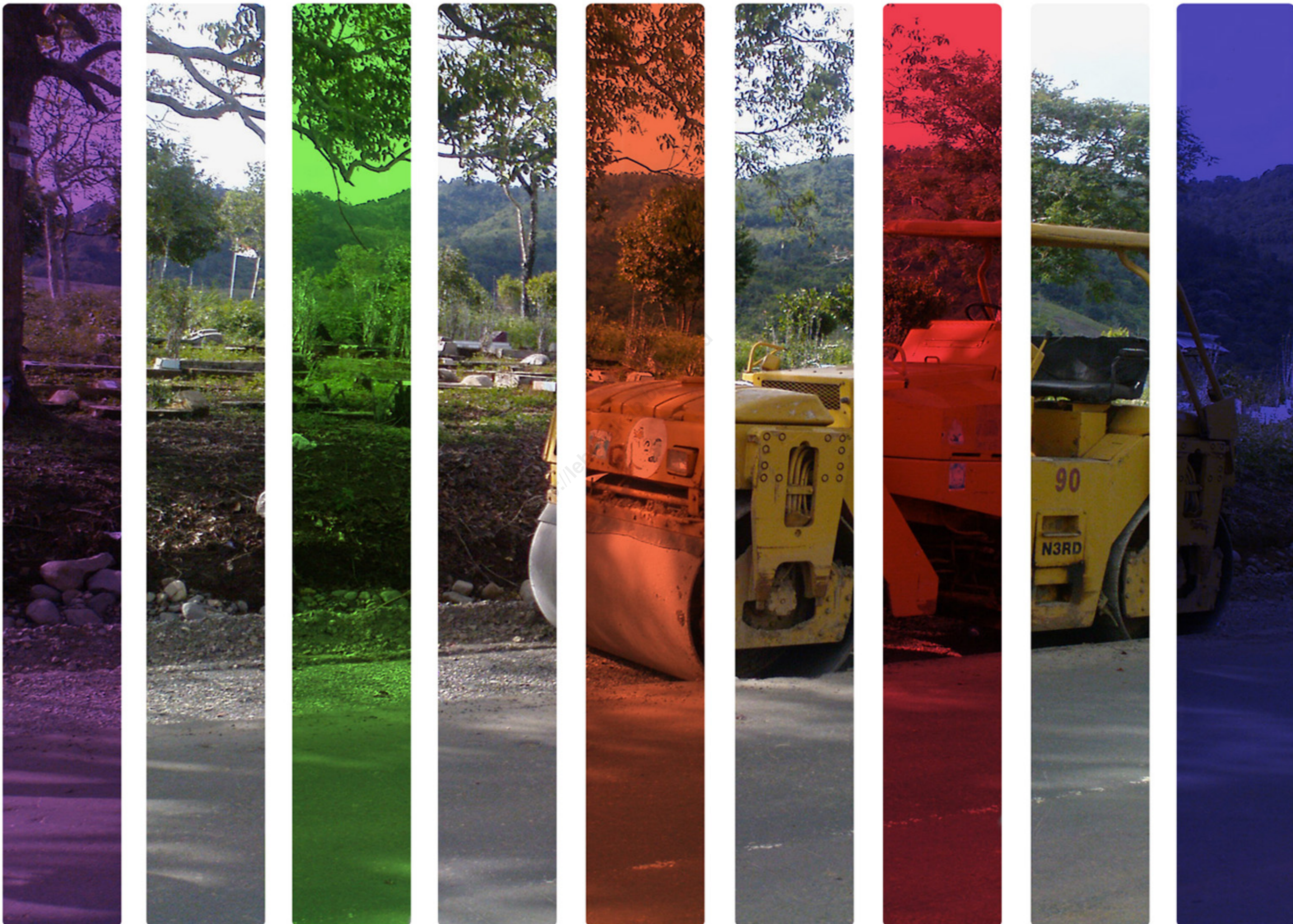


Katalog BPS : 7102025.1707

Nomor : 1707.1103

Indeks

Kemahalan Konstruksi Kabupaten Lebong Tahun 2010



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

KABUPATEN LEBONG

TAHUN 2010

CONSTRUCTION EXPENSIVENESS INDEX OF LEBONG REGENCY 2010

Katalog BPS / <i>BPS Catalog</i>	: 7102025.1707
Nomor Publikasi / <i>Publication Number</i>	: 1707.1103
Ukuran Buku / <i>Book Size</i>	: 21,57 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman / <i>Number of Pages</i>	: vii + 32

Naskah / *Manuscript* :

Seksi Statistik Distribusi BPS

Division of Distribution Statistics BPS

Gambar Kulit / *Cover Design* :

Seksi Statistik Distribusi BPS

Division of Distribution Statistics BPS

Diterbitkan Oleh / *Published by* :

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya

May be Cited With Reference to the Source

KATA PENGANTAR

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya masing-masing sebagai bagian dari perwujudan keberhasilan pembangunan nasional. Bagaimanapun, ketersediaan dana sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, dan sumber pendapatan daerah kabupaten/kota yang utama adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Agar pembagian DAU ke daerah kabupaten/kota menjadi adil, proporsional dan merata, diperlukan dukungan data dasar yang valid, akurat dan terkini. Kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan beberapa komponen, salah satunya adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Untuk itu, dengan diterbitkannya publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong Tahun 2010 ini, diharapkan agar bahan perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan yang lebih baik dan terarah dapat diwujudkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan dan penerbitan publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong Tahun 2010. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan para pengguna data.

Tubei, Oktober 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lebong

Novrizal, SE

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KETERANGAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
BAB 2. METODOLOGI	6
2.1. Konsep dan Definisi	7
2.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data	8
2.3. Kegiatan Pengumpulan Data	9
2.4. Metodologi	10
2.4.1. Paket Komoditas	13
2.4.2. Diagram Timbang (DT) atau Bobot	13
2.4.3. Formula Penghitungan.....	14
BAB 3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG	16
3.1. Keadaan Geografis.....	17
3.2. Penduduk.....	18
3.3. Keuangan Daerah	19
3.4. Potensi Ekonomi	21

BAB 4. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG	25
4.1. IKK Kabupaten Lebong Tahun 2010.....	27
4.2. Perbandingan IKK antar Kabupaten/Kota dan Provinsi.....	27
BAB 5. PENUTUP	30
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Saran	31

<http://lebongkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010	20
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2010.....	21
Tabel 3. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010	28

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong	18
Gambar 2. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebong	19
Gambar 3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Lebong Tahun 2009–2010	23

<http://lebongkab.bps.go.id>



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

<http://lebongkab.bkpsip.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan nasional Indonesia, dewasa ini pemerintah menempuh kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar daerah melalui pemerataan keuangan. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999, sebagian besar urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi sangat strategis. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada 1 Januari 2001, pemerintah daerah dapat mendayagunakan potensi keuangan daerahnya sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selama beberapa tahun terakhir, DAU merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah, begitu juga untuk Kabupaten Lebong. Asas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, kebutuhan fiskal yang dianggarkan melalui DAU dihitung berdasarkan lima komponen yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, maka dalam hal ini BPS merupakan penyedia data untuk empat komponen (kecuali luas wilayah) dari lima komponen kapasitas fiskal penghitungan DAU.

Jumlah penduduk mencerminkan tingkat kepadatan suatu wilayah dan menjadi penimbang bagi pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan. Konsep penduduk yang dimaksud adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan suatu wilayah yang direpresentasikan dalam tiga dimensi yaitu usia hidup (*longevity*) atau kesehatan, pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living standards*).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor ekonomi pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Besarnya nilai PDRB pada masing-masing sektor ekonomi menggambarkan sejauh mana ketergantungan suatu daerah terhadap salah satu sektor ekonomi. Selain itu, PDRB juga dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu

yang dapat dilihat berdasarkan besarnya angka pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, IKK adalah indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi/Harga Bangunan (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi dengan TKK rata-rata nasional. Selain itu, IKK dapat mencerminkan tingkat kesulitan wilayah dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Mengingat pentingnya ketersediaan data komponen penentu besarnya nilai DAU yang valid dan mutakhir, menjadi sangat krusial bagi setiap daerah termasuk Kabupaten Lebong untuk dapat menyajikan data keempat komponen tersebut, salah satunya adalah IKK Kabupaten Lebong tahun 2010. Peranan BPS Kabupaten Lebong selain dalam pengumpulan data dari lapangan, juga berperan untuk melakukan sosialisasi pentingnya data IKK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, sehingga data tersebut dapat memberi manfaat yang optimal bagi pemerintah khususnya dalam penetapan nilai/biaya suatu bangunan konstruksi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan secara merata dan terarah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah. Semakin baik kinerja pemerintah maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan sebuah indeks yang mencerminkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah.

Semakin tinggi nilai IKK maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkan dalam proses konstruksi. Dengan demikian, sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan IKK bagi Pemerintah Kabupaten Lebong, maka perlu dilakukan analisis untuk melihat secara utuh berbagai aspek tentang IKK seperti:

1. Metode penghitungan IKK 2010.
2. Peranan IKK dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Perbandingan IKK Kabupaten Lebong dan IKK Provinsi Bengkulu tahun 2010 terhadap kabupaten/kota dan provinsi lain secara Nasional, serta faktor-faktor yang menyebabkannya.

Adapun maksud dan tujuan pengukuran IKK Kabupaten Lebong tahun 2010 itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2011 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan DAU untuk pengalokasian tahun 2011.
2. Sebagai alat ukur tingkat kemahalan harga bangunan dan perbandingan tingkat kesulitan geografis antar kabupaten/kota.
3. Membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan konstruksi di Kabupaten Lebong.
4. Sebagai standarisasi harga khususnya barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, sehingga dapat ditentukan kewajaran suatu anggaran proyek oleh tim pembahas anggaran proyek.



METODOLOGI

- 2.1. Konsep dan Definisi**
- 2.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data**
- 2.3. Kegiatan Pengumpulan Data**
- 2.4. Metodologi**

<http://lebonkai.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Konsep dan Definisi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menggambarkan perbandingan Tingkat Kemahalan Konstruksi/Harga Bangunan (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah jenis barang/bahan bangunan dan harga sewa alat-alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk daerah/wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah dikenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu daerah/wilayah pada periode tertentu terhadap harga tahun dasar.

IKK dihitung sejak tahun 2003 dengan rata-rata nasional sebagai acuan (sama dengan 100). Tahun 2005 sampai dengan 2009, IKK disajikan dengan memperhitungkan

pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Februari 2004, periode harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004). IKK tahun 2010 menggunakan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai acuan.

Berikut perbedaan indeks spasial dan indeks periodikal:

- a. Indeks spasial (*spatial index*)
 1. Membandingkan harga untuk lokasi berbeda pada waktu yang sama.
 2. Dasar/*reference* adalah rata-rata nasional.
 3. Jarak/kesulitan antar lokasi/wilayah.
 4. Perbedaan struktur harga relatif besar.
 5. *Comparability* dan *representative* sulit diperoleh.
- b. Indeks periodikal (*periodical index*)
 1. Membandingkan harga untuk lokasi yang sama di waktu yang berbeda.
 2. Dasar/*reference* adalah tahun dasar.
 3. Perubahan harga antar waktu.
 4. Perbedaan struktur harga relatif kecil.
 5. *Comparability* dan *representative* mudah diperoleh.

2.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2010 dihitung mencakup 491 kabupaten/kota dan terdapat penambahan 14 kabupaten pemekaran di beberapa

provinsi di Indonesia dari cakupan IKK tahun 2009. Adapun untuk IKK provinsi dihitung di 33 provinsi.

Data dasar yang digunakan dalam penghitungan IKK kabupaten/kota adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, untuk penghitungan IKK provinsi digunakan data harga rata-rata dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang natural/hasil galian, barang-barang hasil industri pengolahan dan jasa sewa alat berat.

Selain data harga, data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah Diagram Timbang (DT) yang terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan (3 kelompok bangunan) dan DT umum masing-masing kabupaten/kota.

2.3. Kegiatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data harga dilakukan secara bulanan menggunakan daftar HPB-K2 di 105 kabupaten/kota. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang serta harga sewa empat macam alat berat. Selain itu, dilakukan pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket komoditas Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2010.

Pengumpulan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan

Konstruksi. Studi ini dilakukan di 20 kabupaten/kota terpilih yang tersebar di 10 provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan April 2004. Kabupaten/kota dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia.

Data lain yang dikumpulkan adalah perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik gedung/konstruksi setiap kelompok jenis bangunan terhadap total nilai pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari setiap pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4. Metodologi

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dihitung menurut pengelompokan jenis bangunan yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang disesuaikan agar memenuhi azas komparabilitas. Seperti halnya IKK 2009, penghitungan IKK 2010 juga menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan.
3. Bangunan lainnya.

Berikut klasifikasi masing-masing kelompok jenis bangunan tersebut:

1. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal:

- a. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun dan perumahan dinas.
 - b. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental lainnya.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan:
- a. Bangunan jalan dan jembatan dan landasan, meliputi: pembangunan jalan, jembatan, pembangunan jalan dan jembatan kereta, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Bangunan pelabuhan, meliputi: pembangunan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan dan penahan gelombang.
3. Bangunan lainnya:
- a. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendungan (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase, irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendalian banjir, tanggul laut, krib, viaduk, serta bangunan tempat proses hasil pertanian yang berupa bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
 - b. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi, transmisi tegangan tinggi, konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, bangunan antena, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api,

bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi menara pemancar radar *microwave*, bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase pada gedung, pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara, jaringan pipa, jaringan air, dan jaringan minyak.

- c. Bangunan lain selain pekerjaan umum untuk pertanian dan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi, meliputi: bangunan sipil, pembangunan lapangan olahraga, serta lapangan parkir.

IKK tahun 2003 dan IKK tahun 2004 disajikan menggunakan acuan rata-rata nasional sama dengan 100. IKK tahun 2005 disajikan menggunakan acuan rata-rata nasional dikalikan dengan perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 yang merupakan periode pencacahan serentak paket komoditi IKK dan sampai dengan tahun 2009 disajikan dengan rata-rata nasional menggunakan inflator sebagai acuan.

Untuk IKK 2010 disajikan dengan menentukan salah satu ibukota provinsi, di mana terdapat satu kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki IKK mendekati angka rata-rata nasional yang digunakan sebagai kota acuan atau provinsi acuan. Kota Balikpapan adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki angka IKK sebesar 100,08 yaitu angka yang paling dekat dengan rata-rata IKK

491 kabupaten/kota, sehingga Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi dipilih sebagai kota acuan dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi acuan untuk IKK provinsi. Kota Samarinda sebagai kota acuan pada penghitungan IKK 2010 akan digunakan untuk penghitungan IKK tahun berikutnya.

2.4.1. Paket Komoditas

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2010 terdiri dari 17 jenis barang dan 4 sewa alat berat, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat *excavator, bulldozer, three wheel roller* (mesin gilas) dan *dump truck*.

Jenis barang dan sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam menyusun masing-masing kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang tersebut mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

2.4.2. Diagram Timbang (DT) atau Bobot

Diagram Timbang (DT) atau bobot terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota yang disusun berdasarkan besarnya volume masing-masing jenis bahan bangunan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per

satuan ukuran luas. Sementara itu, DT umum digunakan untuk menghitung IKK umum, disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota dan dirinci menurut 3 (tiga) kelompok jenis bangunan/konstruksi.

2.4.3. Formula Penghitungan

a. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota

$(TKK_{kab})_j$

$$(TKK_{kab})_j = \sum_{i=1}^{21} P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan ($j = 1,2,3$)

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan i

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan ke- j

b. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) Kelompok Jenis Bangunan Rata-Rata Nasional

(TKK_{nj})

$$TKK_{nj} = \frac{\sum_{k=1}^{491} (TKK_{kab})_j}{491}$$

k = kabupaten/kota (1,2,...,491)

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota

$(IKK_{kab})_j$

$$(IKK_{kab})_j = \frac{(TKK_{kab})_j}{TKK_{nj}} \times 100$$

- d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Umum Kabupaten/Kota $(IKK_{umum})_k$

$$IKK_{kab} = \sum_{j=1}^3 (IKK_{kab})_j \cdot Q'_j$$

$$(IKK_{umum})_k = \frac{(IKK_{kab})_k}{(IKK_{kab})_{Kota\ Samarinda}} \times 100$$

Q'_j = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota



GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG

- 3.1. Keadaan Geografis**
- 3.2. Penduduk**
- 3.3. Keuangan Daerah**
- 3.4. Potensi Ekonomi**

<http://lebongkab.bpk.go.id>

BAB 3

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG

3.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat pegunungan barisan yang di sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi, sebelah barat Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, dan Kabupaten Rejang Lebong di sebelah selatan. Wilayah Kabupaten Lebong terletak pada 101° sampai dengan 102° bujur timur dan $02^{\circ}65'$ sampai dengan $03^{\circ}6'$ lintang selatan.

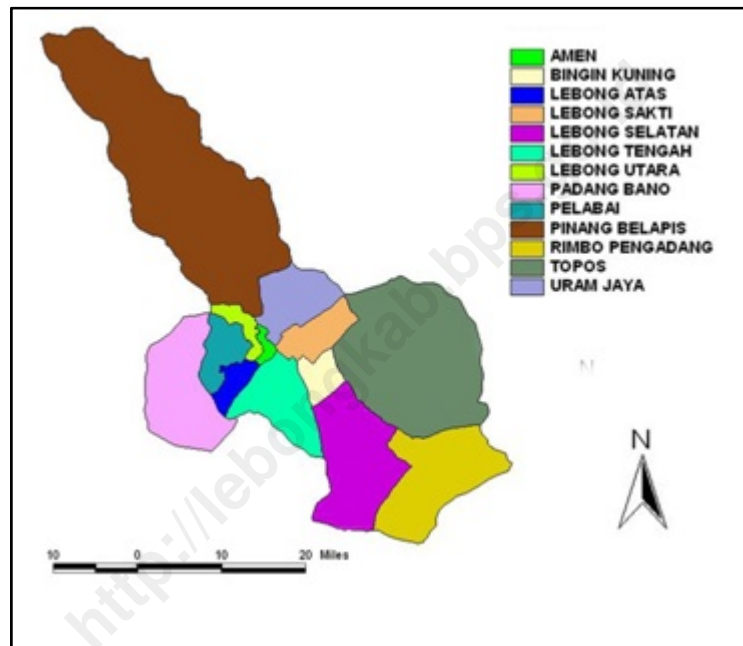
Kabupaten Lebong terbentuk ketika terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Pada saat itu Kabupaten Lebong terdiri dari lima kecamatan, yaitu: Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Lebong Atas. Sejak tahun 2008, jumlah kecamatan di Kabupaten Lebong menjadi 13 kecamatan karena adanya penambahan kecamatan baru maupun pemekaran, yaitu: Kecamatan Padang Bano, Kecamatan Amen, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Topos dan Kecamatan Pelabai.

Luas wilayah Kabupaten Lebong adalah $2.427,31^*)$ km², terdiri dari 13 kecamatan yang terbagi menjadi 98 desa dan 11 kelurahan. Ibukota Kabupaten Lebong

*) Sumber: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebong

adalah Tubei yang berlokasi di Kecamatan Lebong Atas, sedangkan pusat perekonomiannya terletak di Kecamatan Lebong Utara. Berdasarkan topografinya, wilayah Kabupaten Lebong terletak pada ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut dengan lebih dari 50 persen luas wilayahnya berupa hutan lindung.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong

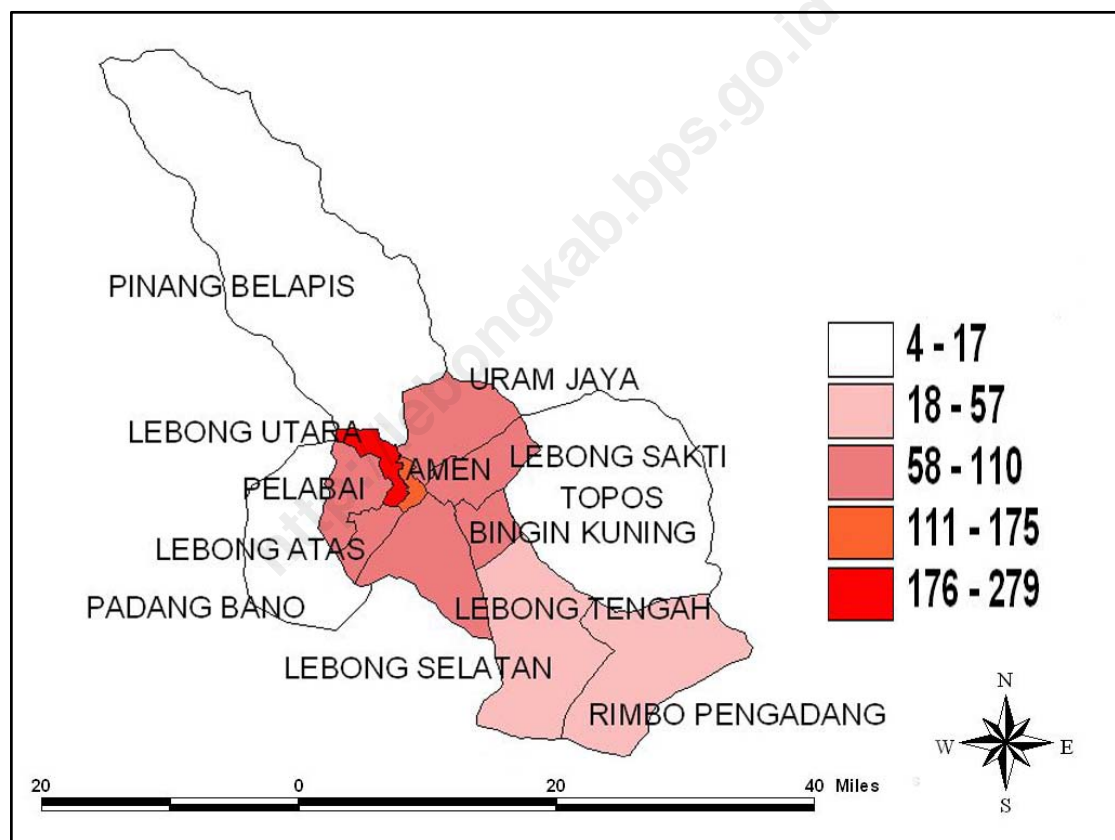


3.2. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk Mei 2010 adalah 99.215 orang, yang terdiri dari 50.762 laki-laki dan 48.453 perempuan. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) di Kabupaten Lebong adalah sebesar 104,77.

Dengan luas wilayah 2.427,31 km² yang didiami 99.215 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lebong adalah 41 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lebong Utara, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Padang Bano. Gambar 2. di bawah ini menunjukkan tingkat kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Lebong.

Gambar 2. Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebong



3.3. Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi

sumber pendapatan daerah sehingga tidak terlalu menggantungkan diri pada keuangan pemerintah pusat. Kenyataannya, hampir seluruh daerah di Indonesia masih menggantungkan diri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010

Nomor	Jenis Penerimaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
A.	Pendapatan Asli Daerah	10,746,526,579.83
1	Pendapatan Pajak Daerah	1,222,123,778.00
2	Hasil Retribusi Daerah	668,575,778.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,856,532,630.83
4	Lain-Lain PAD yang dipisahkan	6,999,294,393.00
B.	Dana Perimbangan	279,191,678,713.00
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	34,442,628,713.00
2	Dana Alokasi Umum	218,618,650,000.00
3	Dana Alokasi Khusus	26,130,400,000.00
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	40,315,717,628.47
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	7,997,007,023.47
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32,318,710,605.00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong sebagai kabupaten yang baru terbentuk masih memiliki keterbatasan dan belum maksimal dalam menghasilkan PAD. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan daerah Kabupaten Lebong tahun 2010. PAD Kabupaten Lebong tahun 2010 sebesar Rp.10.746.525.856,83,-. Sementara itu, DAU dan DAK Kabupaten Lebong tahun 2010 masing-masing sebesar Rp.218.618.650.000,- dan Rp.26.130.400.000,-.

Pada tahun 2010, realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lebong adalah sebesar Rp.294.474.342,- atau 52,83 persen dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp.557.415.869,-. Rincian realisasi pajak bumi dan bangunan tiap kecamatan di Kabupaten Lebong dapat dilihat dalam Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong Tahun 2010

Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimbo Pengadang	1,762	39,831,255	392,171	0.98
Lebong Selatan	5,468	79,135,193	19,854,608	25.09
Lebong Tengah	2,627	22,613,664	8,062,621	35.65
Lebong Utara	3,688	62,457,043	43,960,432	70.39
Lebong Atas	1,463	19,275,878	1,850,000	9.60
Uram Jaya	1,052	12,924,083	5,538,984	42.86
Pinang Belapis	1,158	17,558,454	13,100,310	74.61
Amen	2,385	40,051,072	8,292,900	20.71
Topos	1,324	16,301,048	728,264	4.47
Bingin Kuning	3,084	36,765,596	13,693,110	37.24
Lebong Sakti	2,532	20,492,931	10,781,444	52.61
Pelabai	1,937	26,663,448	4,873,294	18.28
PLTA Tes	1	163,346,204	163,346,204	100.00
Jumlah	28,481	557,415,869	294,474,342	52.83

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong

3.4. Potensi Ekonomi

Dibandingkan tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Lebong tahun 2010 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lebong atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar

961.480 juta rupiah yang mengalami peningkatan sebesar 11,85 persen menjadi 1.075.393 juta rupiah pada tahun 2010. Kenaikan tersebut selain disebabkan karena terjadinya peningkatan produksi juga karena naiknya harga beberapa komoditi terutama pertanian. Selain itu, pada tahun 2010 Kabupaten Lebong juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 5,19 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 4,63 persen.

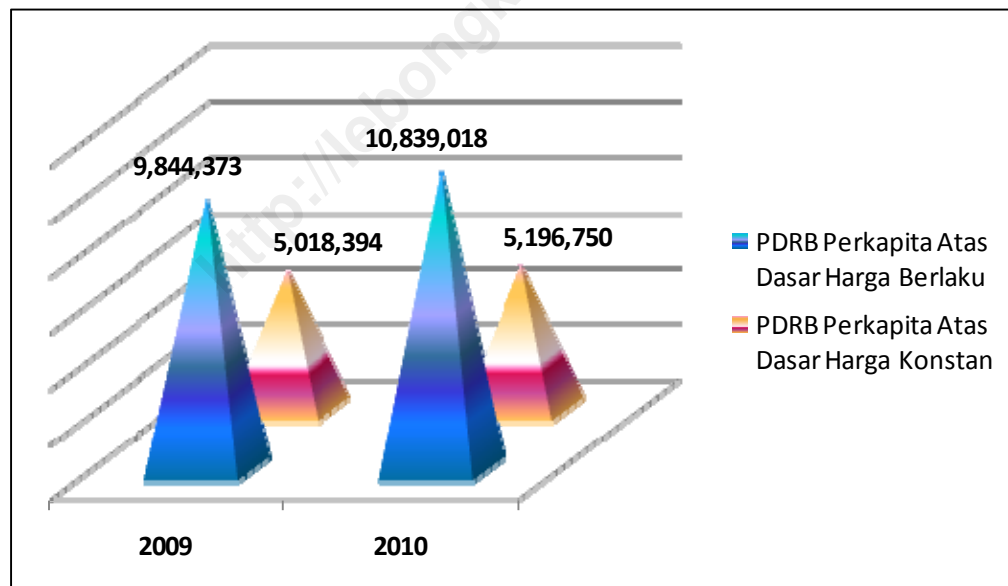
Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan kondisi perekonomian di wilayah Kabupaten Lebong.

Pada tahun 2010, pertumbuhan masing-masing sektor di Kabupaten Lebong mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pertanian yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lebong tahun 2010 mengalami kenaikan 5,29 persen. Laju pertumbuhan sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan pada subsektor pertanian tanaman bahan makanan sebesar 6,30 persen.

Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor bangunan/konstruksi yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,51 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,12 persen. Hal ini disebabkan karena subsektor sewa bangunan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,00 persen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebong secara berkesinambungan, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang mendukung. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan peningkatan infrastruktur, misalnya infrastruktur jalan. Dengan begitu, kemudahan akses untuk keluar masuk wilayah Kabupaten Lebong dapat tercapai. Selain semakin memperlancar arus distribusi barang, sedikit demi sedikit peningkatan infrastruktur yang memadai akan dapat menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lebong.

Gambar 3. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Lebong Tahun 2009 – 2010



Bila dilihat dari nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Lebong, secara umum tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Lebong tahun 2010 mengalami peningkatan dibanding tahun 2009. Pada tahun 2009 PDRB perkapita

penduduk Kabupaten Lebong sebesar 9,844 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 10,11 persen menjadi 10,839 juta rupiah.

Bila ditinjau dari harga konstan tahun 2000, maka PDRB perkapita penduduk Kabupaten Lebong tahun 2010 mengalami kenaikan hanya sebesar 3,55 persen dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari 5,018 juta rupiah di tahun 2009 menjadi 5,196 juta rupiah di tahun 2010.

<http://lebongkab.bps.go.id>



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN LEBONG

- 4.1. IKK Kabupaten Lebong Tahun 2010**
- 4.2. Perbandingan IKK antar
Kabupaten/Kota dan Provinsi**

<http://lebongkab.bpk.go.id>

BAB 4

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

KABUPATEN LEBONG

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan tingkat kemahalan harga bahan bangunan/konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota atau provinsi lainnya. Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi.

Penghitungan IKK dilakukan pada setiap kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia dengan menggunakan metode jenis barang dan jasa, serta waktu pencacahan yang sama sehingga hasilnya *comparable* untuk menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi antar wilayah se-Indonesia dalam kurun waktu yang sama.

Dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), proporsi IKK cukup besar dibandingkan dengan jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar IKK suatu daerah, semakin besar pula DAU yang akan diperoleh. Hal ini dikarenakan TKK yang tinggi menyebabkan semakin tinggi pula dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan fisik di wilayahnya.

4.1. IKK Kabupaten Lebong Tahun 2010

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2010 telah dihitung untuk 491 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia, termasuk di antaranya adalah IKK Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. IKK Kabupaten Lebong pada tahun 2010 sebesar 90,72 dan IKK Provinsi Bengkulu adalah 87,83. Adapun IKK rata-rata nasional adalah sebesar 100 dimana Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan sebagai acuan (IKK Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur sama dengan 100). IKK Kabupaten Lebong dan IKK Provinsi Bengkulu yang berada di bawah IKK rata-rata nasional mencerminkan bahwa akses masyarakat di Kabupaten Lebong dan di Provinsi Bengkulu secara umum dalam memperoleh bahan-bahan konstruksi masih relatif lebih mudah dan wilayahnya masih relatif lebih terjangkau dibandingkan kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

4.2. Perbandingan IKK antar Kabupaten/Kota dan Provinsi

Angka Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 berkisar antara 88 sampai dengan 95. Berdasarkan tinggi rendahnya IKK, Kabupaten Lebong berada pada posisi keempat tertinggi diantara daerah tingkat II lainnya di Provinsi Bengkulu, yaitu setelah Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Kepahiang. Sementara itu untuk level provinsi, angka IKK Provinsi Bengkulu yang sebesar 87,83 menempati peringkat ke-21 tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia. IKK provinsi yang tertinggi adalah IKK Provinsi Papua sebesar

210,10 dan IKK terendah adalah IKK Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 83,36. Angka ini semakin menunjukkan bahwa tingkat kesulitan geografis dan akses masyarakat Bengkulu terhadap barang-barang konstruksi cenderung lebih mudah.

Tabel 3. Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010

Provinsi/Kabupaten/Kota	IKK
(1)	(2)
Bengkulu Selatan	90,68
Rejang Lebong	89,02
Bengkulu Utara	89,61
Kaur	94,07
Seluma	89,47
Mukomuko	91,70
Lebong	90,72
Kepahiang	91,07
Bengkulu Tengah	88,46
Kota Bengkulu	88,08
Provinsi Bengkulu	87,83

Pada tahun 2010, IKK kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu seluruhnya menunjukkan angka lebih rendah dari 100. IKK terendah sebesar 88,08 yang merupakan IKK Kota Bengkulu menunjukkan secara nyata bahwa masyarakat Kota Bengkulu relatif lebih mudah mendapatkan barang-barang konstruksi dibandingkan masyarakat di sembilan kabupaten lain. Bahkan, ketersediaan barang-barang konstruksi di sembilan kabupaten tersebut cenderung dipengaruhi oleh ketersediaan di Kota Bengkulu. Selain itu, angka IKK masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-

beda menunjukkan adanya variasi harga bangunan di masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu sebagai dampak dari lokasi yang sulit dan jauh dari pusat-pusat perekonomian.

Sebagai indeks spasial, besaran IKK lebih dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas bahan bangunan antar daerah dibandingkan dengan perkembangan harga antar waktu (*time series*) di suatu daerah. Perbedaan harga antar daerah, selain dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti permintaan dan penawaran, juga dipengaruhi oleh faktor geografis seperti jarak antara daerah penghasil (pusat produksi) dan pusat distribusi dengan daerah atau lokasi penjualan. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi atau pusat distribusi, harga komoditas pada umumnya lebih mahal. Dengan kata lain, perbedaan harga barang antar daerah berkaitan erat dengan darimana barang tersebut berasal.



PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

<http://lebongkab.bkpsip.go.id>

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2010 Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Lebong sebesar 90,72 adalah lebih rendah dibandingkan IKK rata-rata nasional 100 yang merupakan IKK Kota Samarinda (Kota Samarinda menjadi kota acuan).
2. IKK Kabupaten Lebong tahun 2010 berada pada posisi ke-4 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
3. Untuk level provinsi, besaran IKK Provinsi Bengkulu berada di peringkat ke-21 tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia dimana yang menjadi provinsi acuan adalah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Variasi angka IKK kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya perbedaan biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan luas pada masing-masing kabupaten di Provinsi Bengkulu.

5.2. Saran

Berdasarkan data/informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, sebenarnya ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan para investor dalam

rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Lebong. Kondisi geografis Kabupaten Lebong yang tergolong dataran tinggi sangat membutuhkan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan mampu membuat kebijakan yang terarah dengan kombinasi yang tepat antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan dana. Selain itu, dalam rangka memperlancar jalannya pembangunan, maka pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki sarana penunjang seperti transportasi agar dapat mempermudah akses komoditi keluar masuk wilayah Kabupaten Lebong. Adapun investor maupun kontraktor sebaiknya mempunyai acuan dalam hal biaya dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan sehingga akan menghasilkan produk yang berkualitas.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LEBONG
Kompleks Perkantoran Jalur Dua Tubei
email: bps1707@mailhost.bps.go.id